

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Samsu dan Ashar Prawitno, "Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 8, No. 2 (2015): 93-104.
- Arif, Saiful. "Partisipasi, Demokrasi dan Pembangunan" dalam *Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*, editor Happy Budi Febriasih. Malang: Averroespress, 2012.
- Badan Pusat Statistik, Kecamatan Rawalo Dalam Angka 2016. Kabupaten Banyumas: 2016.
- Bowman, Ann O'M. dan Richard C. Kearney. "Dimension of State Government Capability." *The Western Political Quarterly*, Vol 41, No. 2 (1988): 341-362.
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Desa yang Berasal dari APBD Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester 1) pada Pemerintah Kabupaten Brebes dan Instansi Terkait Lainnya di Brebes*. Semarang: BPK, 2016.
- Damanik, Caroline. Enam Kepala Desa Menjadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa, dalam *kompas.com* [online] (2 April 2017). Diakses dari <<http://regional.kompas.com/read/2016/05/12/15310001/Enam.Kepala.Desa.Jadi.Tersangka.Dugaan.Korupsi.Dana.Desas>>.
- Desa Rawalo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rawalo Tahun Anggaran 2015. Desa Rawalo: 2014.
- Desa Rawalo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rawalo Tahun Anggaran 2016. Desa Rawalo: 2015.
- Desa Rawalo, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Desa Rawalo: 2015.
- Desa Rawalo, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Desa Rawalo: 2016.
- Desa Rawalo, Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015. Desa Rawalo: 2014.
- Desa Rawalo, Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016. Desa Rawalo: 2015.
- Desa Rawalo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019. Desa Rawalo: 2014.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Republik Indonesia. *Buku Acuan Kepemimpinan Desa*. Jakarta:  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Republik Indonesia, 2015.

Dwiyanto, Agus, dkk. *Kinerja Tata Pemerintahanan Daerah di Indonesia*.  
Yogyakarta: PSKK UGM, 2007.

Eaton, Joseph W. *Institution Building and Development: From Cocepts to  
Application*. California: Sage Publications Inc., 1972.

Eko, Sutoro, dkk. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD, 2014.

Eko, Sutoro, dkk. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE  
Press, 2005

Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis*.  
Yogyakarta: Gava Media, 2009.

Jajeli, Rois. Tujuh Orang ‘Korupsi’ Dana Desa Diringkus Tim Saber Pungli Polda  
Jatim, dalam *detik.com* [online] (4 April 2017). Diakses dari  
<[https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3364250/tujuh-orang-  
korupsi-dana-desa-diringkus-tim-saber-pungli-polda-jatim](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3364250/tujuh-orang-korupsi-dana-desa-diringkus-tim-saber-pungli-polda-jatim)>.

Kelembagaan. dalam *bappenas.go.id* [online] (22 Februari 2017). Diakses dari <  
<http://www.bappenas.go.id/files/4913/5078/6556/15.pdf>>.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan Umum Dana Desa TA  
2016. dalam *kemenkopmk.go.id* [online] (10 Maret 2016). Diakses dari  
[cisd1.org/files/53a4d07ef0deb626b0f0d186dd6f27742834a016.pdf](https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/53a4d07ef0deb626b0f0d186dd6f27742834a016.pdf).

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Kebijakan Umum Dana Desa. dalam  
*kemenkopmk.go.id* [online] (10 Maret 2016). Diakses dari  
[https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/field/file\\_pendukung/S  
essi%20I%20-%20KemenKeu%20-  
%20Bahan%20Sosialiasi%20Dana%20Desa%2028%20April%202015.p  
df](https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/field/file_pendukung/Sessi%20I%20-%20KemenKeu%20-%20Bahan%20Sosialiasi%20Dana%20Desa%2028%20April%202015.pdf).

Kumorotomo, Wahyudi. “Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas dari KKN” dalam  
*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, editor Agus  
Dwiyanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Kusumasari, Belaova. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*.  
Yogyakarta: Gava Media, 2014.

*Laporan Akhir Penyusunan Pedoman Diklat Teknis Bagi Pegawai Pemda Kabupaten Sleman, Konkorsium.* Yogyakarta: PT. Widya Graha Asana-PSPPR UGM-CEISS, 2008.

Lawless, David J. *Effective Management: Social Psychological Approach.* New Jersey: Prentice Hall Inc., 1972.

Lembaga Administrasi Negara. *Penerapan Good Governance di Indonesia.* Jakarta: LAN, 2007.

Milèn, Anneli. *What Do We Know About Capacity Building? An Overview of existing knowledgr and good practice.* Geneva: Department of Health Service Provision WHO, 2001.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru.* Jakarta: UI Press, 1992.

Nurcholis, Hanif. "Pengembangan Kapasitas Pemda: Upaya Mewujudkan Pemda yang Menyejahterakan Masyarakat." *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 1, No. 1 (2005): 49-58.

Pohan, Max H. Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah, dalam *bappenas.go.id* [online] (22 Februari 2017). Diakses dari [http://bappenas.go.id/files/7813/5022/6072/goodgov-musibanyuasin\\_20091008103033\\_2165\\_0.pdf](http://bappenas.go.id/files/7813/5022/6072/goodgov-musibanyuasin_20091008103033_2165_0.pdf).

Rafiananda, Irsyad. Sudah Baguskah Pengelolaan Dana Desa?. dalam *himiepsa.feb.ugm.ac.id* [online] (2 April 2017). Diakses dari <http://himiespa.feb.ugm.ac.id/sudah-baguskah-pengalokasian-dana-desa/>.

Rahmad. "Kapasitas Pemerintah Kecamatan dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi Tentang Identifikasi Kapasitas Potensial yang Dimiliki Kecamatan dalam rangka Memberdayakan Usaha Ekonomi Sektoral Informal di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak)." Tesis, FISIP Universitas Gadjah Mada, 2006.

Relianus, Kristo. Masalah Pengelolaan Keuangan Desa. dalam *kupang.tribunnews.com* [online] (5 April 2017). Diakses dari <http://kupang.tribunnews.com/2016/04/08/masalah-pengelolaan-keuangan-desa>.

Sari, Novita, Irwan Noor, dan Wima Yudho Prasetyo. "Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan Terpadu (Studi pada Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kediri)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 2, No. 1 (2014): 634-640.

- Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Bali, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa, dalam [denpasar.bpk.go.id](http://denpasar.bpk.go.id) [online] (5 April 2017). Diakses dari [denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/04/Tulisan-hukum-dana-desa.pdf](http://denpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/04/Tulisan-hukum-dana-desa.pdf).
- Sumarto, Hetifah Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Sutiono, Agus dan Ambar Teguh Sulistiyani. "Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Dalam Birokrasi Publik di Indonesia" dalam *Memahami Good Governance Dalam Prespektif Sumber Daya Manusia*, editor Ambar Teguh Sulistiyani. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Ucu, Karta Raharja. Dana Desa Dijamin Rp 1 Miliar per Desa pada 2016, dalam [republika.co.id](http://republika.co.id), diupload pada 16 Mei 2015, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/16/nog8bu-dana-desa-dijamin-rp-1-miliar-per-desa-pada-2016>.
- Wibawa, Samodra. *Reformasi Administrasi Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*. Yogyakarta: Gava Media, 2005.
- Willems, Stéphane dan Kevin Baumert. *Institutional Capacity and Climate Actions*. Paris: OECD, 2003.
- Yopeng, Simon. "Kapasitas Pemerintah Distrik Kiworok dalam Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Tentang Kapasitas Pemerintah Distrik Kiworok dalam Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Kiworok Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua)." Tesis, FISIP Universitas Gadjah Mada, 2009.

## **Peraturan Resmi**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 900/5356/SJ, No. 959/KMK.07/2015, No. 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.